PENYULUHAN HUKUM PIDANA ISLAM (TA'ZIR) SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Syawal Hidayatullah

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha
syawalhidayat.dayat@gmail.com

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum pidana Islam (Ta'zir) bagi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, metode yang digunakan adalah metode non penelitian dimana semua hasil data ditulis secara alamiah tanpa adanya manipulasi. Salah satu bentuk penelitian non penelitian yang digunakan adalah penyuluhan kepada masyarakat berupa penyuluhan, penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2024, penyuluhan yang dilaksanakan diikuti oleh masyarakat PAYO LEBAR KOTA JAMBI, kegiatan penyuluhan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB. Kegiatan penyuluhan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, penyampaian materi berupa pengenalan hukum, hukum di Indonesia, pentingnya memahami hukum, hukum pidana Islam (Ta'zir), ice breaking, mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang telah diberikan, kemudian diakhiri dengan penutup. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum pidana Islam (Ta'zir) bagi masyarakat, dan masyarakat lebih memahami hukum-hukum di Indonesia. Diharapkan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih terbuka terhadap hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Peningkatan Pemahaman Hukum, Ta'zir, Kegiatan Penyuluhan

Abstract

This community service aims to improve the understanding of Islamic criminal law (Ta'zir) for the community through counseling activities, the method used is a non-research method where all data results are written naturally without manipulation. One form of non-research research used is community education in the form of counseling, counseling was carried out on August 25, 2024, the counseling carried out was attended by the PAYO LEBAR KOTA JAMBI community, counseling activities started at 10:00 WIB until 12:30 WIB. Counseling activities began with an opening, singing the song Indonesia Raya, reading prayers, delivering material in the form of an introduction to law, law in Indonesia, the importance of understanding law, Islamic criminal law (Ta'zir), ice breaking, measuring the level of public understanding of the material that has been given, then ending with a closing. The results of the counseling showed an increase in understanding of Islamic criminal law (Ta'zir) for the community, and the community better understood the laws in Indonesia. It is hoped that the counseling activities that have been carried out can have a good impact on the community and make the community more open to the law in Indonesia.

Keywords: Increasing Understanding of Law, Ta'zir, Extension Activities

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai hukum maka berbicara mengenai asas-asas dan dasar-dasar manusia dalam menjalankan kehidupan. Hukum dan kehidupan manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum mengatur kehidupan manusia dan menjadi dasar manusia dalam menjalankan kehidupan. Manusia menjadikan hukum sebagai pedoman, baik itu hukum agama, hukum negara, maupun hukum adat. Hukum merupakan serangkaian sistem peraturan yang digunakan sebagai landasan dalam mengatur individu masyarakat serta mencapai dan memenuhi kebutuhan masyarakat Hidayat dkk. (2022:20). Sehingga hukum mengatur manusia secara kompleks agar dalam menjalankan kehidupan manusia bisa berjalan lurus dalam kebaikan.

Dalam suatu negara, hukum menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan sebagai individu dalam masyarakat, yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara, serta menetapkan konsekuensi atau hukuman yang setimpal jika melanggar. Hukum memiliki sifat mutlak dan memaksa bagi setiap masyarakat, sehingga setiap individu wajib mentaati hukum yang diberlakukan dalam suatu negara.

Hukum ditegakkan oleh badan-badan resmi yang berwajib dan memiliki wewenang. Penegakan hukum tidak dapat diampuni oleh sembarangan orang. Penegakan hukum harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar paham hukum dan bisa menegakkan keadilan dan mengesampingkan segala hal yang dapat memicu keberpihakan. Karena hukum sejatinya menjadi pelindung bagi setiap individu yang ada dalam cakupan wilayah suatu negara. Sehingga sangat penting untuk mewujudkan keadilan dalam menjalankan hukum.

Namun hukum yang kita lihat sekarang masih jauh dari kata keadilan, masih banyak oknum penegak hukum yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai alasan, masih banyak oknum hukum yang dikuasai oleh penguasa untuk mempertahankan kebebasannya dalam menjalankan kejahatan, ataupun oknum hukum yang didorong keberpihakannya dengan memberikan berbagai embel-embel hadiah seperti suap. Hal ini menjadikan pandangan masyarakat pada hukum semakin retak. Sehingga masyarakat banyak yang malas untuk berhubungan dengan hukum.

Padahal hukum memegang erat hak asasi setiap manusia. Hukum tak seharusnya menjadi ketakutan dalam menjalankan kehidupan, namun hukum dapat dijadikan sebagai pedoman, agar dalam menjalankan kehidupan setiap individu dapat terarah dengan baik dan terhindar dari kejahatan yang salah.

Penjelasan di atas menunjukkan bagaimana hubungan dekat antara hukum dan individu seharusnya berjalan. Hukum dan masyarakat menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan, keduanya hidup berdampingan dan berpengaruh terhadap satu sama lain. Hukum mengaitkan diri dengan masyarakat sebagai bentuk sosial. Sehingga hukum harus menitik beratkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat maupun pemberian sistem pelayanan. Hidayat dkk. (2022:54).

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum dan segala komponennya sejatinya merupakan bentuk sistem yang membantu dan melayani masyarakat agar selalu mendapatkan haknya. Hukum bekerja untuk masyarakat, dan masyarakat bekerja untuk menjalankan hukum. Ikatan

hubungan ini seharusnya menjadi pendorong agar dalam pelaksanaan hukum masyarakat akan menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan. Sehingga semua pandangan masyarakat akan dianggap sama tanpa melihat status sosial dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan hukum, pengambilan keputusan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang adil agar keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan hukum yang tertera dan tidak merugikan pihak yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan hukum dan hukum sangat berpengaruh bagi masyarakat. Sehingga keduanya harus bisa saling seimbang agar dapat menciptakan keputusan hukum yang baik.

Dalam dunia hukum, hukum telah dibagi berdasarkan permasalahan yang dibahas. Salah satu pembagian hukum yaitu hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan mengenai apa saja perbuatan yang dilarang dan terlarang, serta hukuman apa yang akan didapatkan jika melanggar. Hukum pidana hadir untuk menciptakan rasa aman pada diri setiap individu dalam masyarakat. Chandra (2022:19). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang berpihak pada individu yang benar. Serta hukuman bagi individu yang salah. Sehingga setiap individu akan mendapat ganjaran setimpal sesuai dengan perbuatan yang diperbuatnya.

Adanya hukum pidana seharusnya menjadikan masyarakat lebih aman dalam menjalankan kehidupan. Masyarakat tidak perlu khawatir dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari karena ada hukum yang melindunginya. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapat perlakuan dan penegakan hukum.

Pentingnya hukum bagi kehidupan manusia membuat hukum menjadi salah satu fokus utama dalam perkembangan pembangunan negara. Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mendukung terwujudnya visi misi Indonesia Emas 2045. Salah satu point dalam rencana ini yaitu misi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia yaitu untuk menciptakan hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial. Hal ini guna menjadikan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Perwujudan visi misi tersebut hanya bisa terealisasi jika terjalannya kerja sama yang baik antara semua komponen penjamin hukum di Indonesia. Setiap komponen badan hukum memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang harus berjalan dengan baik agar dapat mewujudkan visi misi tersebut. Selain itu juga perlu upaya lain agar dapat mempercepat perwujudan tersebut. Seperti upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum. Karena jika dilihat dari kehidupan sekitar, masih banyak masyarakat yang kurang dalam memahami hukum, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Kurangnya hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kurangnya pemberian informasi pada masyarakat mengenai hukum, kurangnya pendisiplinan yang dilakukan pada pelanggar hukum, semakin maraknya contoh buruk terkait pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah, berita-berita buruk mengenai lembaga hukum, dan berbagai alasan lainnya. Hal ini menjadikan masyarakat semakin tidak percaya hukum dan enggan untuk memahami masalah hukum, karena merasa bahwa hukum hanya memihak pada para elit dan

kejam pada masyarakat biasa. Padahal hukum seharusnya menjadi pelindung bagi setiap individu dan memberikan kemudahan akses hukum bagi setiap masyarakat.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM menyatakan bahwa gejala ini dapat dilihat dari berbagai macam penurunan apresiasi masyarakat terhadap lembaga hukum, melemahnya kekuatan hukum dipandangan masyarakat, serta budaya pelanggaran hukum yang semakin marak terjadi. Di berbagai daerah di Indonesia, masih banyak masyarakat yang mengabaikan hukum. Salah satu contohnya adalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Seringkali pengemudi masih melanggar berbagai larangan hukum, seperti menerobos lampu merah, melanggar rambu lalu lintas, melanggar peraturan mengemudi, dll. Contoh lainnya yaitu kekerasan. Kita banyak melihat pemberitaan di berbagai media sosial tentang kekerasan yang sering terjadi baik di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terlalu serius sehingga tidak perlu terlalu ditekankan.

Masalah ini tidak boleh berlanjut. Upaya serius harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap undang-undang agar masyarakat lebih menyadarinya dan dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Meningkatnya pemahaman hukum di masyarakat juga membantu individu melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami hukum. Karena menyebarkan satu informasi akan meningkatkan pemahaman orang lain terhadap ribuan informasi lainnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi masyarakat adalah dengan penyelenggaraan penyuluhan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum menyatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan informasi dan pemahaman terkait norma hukum pada publik agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Sehingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berdampak pada kesadaran masyarakat luas mengenai norma-norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka pelanggaran hukum yang akan terjadi.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga menyatakan bahwa Kesadaran Hukum pada individu masyarakat merupakan sebuah nilai yang hidup dalam diri masyarakat berupa pemahaman hukum serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hal inilah yang berusaha diwujudkan melalui penyuluhan hukum pada masyarakat, yaitu penanaman pemahaman hukum, ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Penyuluhan Hukum dapat dilaksanakan oleh berbagai instansi, mulai dari pemerintahan, swasta, instansi pendidikan hukum, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Salah satu materi yang penting untuk dibahas adalah hukum pidana islam. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Indonesia memiliki 87% penduduk yang memeluk agama islam, tentunya hukum islam juga sudah menyatu dengan hukum yang diterapkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman pemahaman masyarakat terkait hukum pidana islam sangat penting untuk diwujudkan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan penyuluhan yang berjudul “Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta’zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat”.

METODE

Penelitian ini dilakukan di PAYO LEBAR KOTA JAMBI pada tanggal 25 Agustus 2024. Bentuk penelitian yang digunakan yaitu penyuluhan mengenai Hukum Pidana Islam (Ta’zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode non riset. Ppenelitian non riset merupakan sistematika penelitian dimana peneliti tidak memiliki kontrol langsung terhadap variabel independen karena tidak dapat di manipulasi. Johnson & Christensen (2014). Penelitian non riset merupakan penelitian yang murni, dimana data yang diperoleh merupakan data asli sesuai dengan yang terjadi dilapangan tanpa bisa di rubah ataupun dimanipulasi datanya. Sehingga metode non riset memang menuliskan kejadian sesuai dengan yang terjadi tanpa dimanipulasi.

Salah satu bentuk dari penelitian non riset yang digunakan adalah pendidikan masyarakat berupa penyuluhan. Penyuluhan merupakan serangkaian kegiatan mengenai proses perubahan terhadap individu maupun kelompok melalui kegiatan penyuluhan. Gunawa (2021). Penyuluhan menjadikan individu atau kelompok lebih dewasa dalam materi yang diberikan, sehingga akan ada perubahan kearah yang lebih baik. Kegiatan penyuluhan memberikan wadah bagi masyarakat yang kurang mendapatkan informasi terkait suatu hal agar bisa mendapatkannya melalui kegiatan penyuluhan yang diadakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Materi Penyuluhan

1. Hukum di Indonesia

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan terpenting. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia mempunyai aturan yang ketat terhadap seluruh warga negaranya. Setiap aspek kehidupan diatur sedetail mungkin oleh undang-undang.

Penerapan hukum di Indonesia adalah sama bagi semua warga negara, tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan ras. Oleh karena itu, ketentuan hukum di Indonesia bersifat mutlak dan tidak ada yang dapat menentangnya.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana adalah seperangkat aturan untuk semua tindakan yang dilarang dan hukuman yang dijatuhkan atas pelanggarannya. Menurut Muslih (2014), hukum pidana Islam disebut juga fiqh jinayah. Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata. Fiqh berasal dari pengucapan Faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti “mengerti” atau “paham”.

Pengertian istilah Fiqh dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf. Dijelaskannya, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diperoleh berdasarkan

bukti-bukti yang terperinci. Jinayah berasal dari kata jana, jinayah berarti "mengutip", "dosa", atau "kesalahan".

Dalam bahasa ini kejahatan terjadi akibat perbuatan orang jahat dan usaha yang dilakukannya. Pengertian jinayah dalam kaitannya dengan fuqaha sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awda jinayah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan itu menyangkut nyawa, harta benda, atau yang lainnya.

Menurut Lubis dan Ritonga (2016), hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dihukum oleh Tuhan dengan hukuman Hudud, Kishash, Diyat, atau Tazir.

Pengertian Fiqh jinayah di atas sesuai dengan pengertian hukum pidana berdasarkan hukum positif. Menurut Musli, KUHP merupakan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana yang diancam pidana. Jinayah berarti suatu perbuatan yang mempunyai akibat yang berbahaya, seperti hilangnya nyawa, harta benda, atau kehormatan.

3. Ta'zir

a) Pengertian Ta'zir

Secara etimologi ta'zir berarti menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan. Banyak pengertian ta'zir yang dikemukakan oleh tokoh agama, yaitu :

- Ibrahim Anis, dkk. tim penyusun kamus Al-Mu'jam Al-Wasit.
Ta'zir merupakan ajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti ajaran seseorang yang mengutuk (pihak lain) tetapi tidak menuduh (orang lain berzina). Dalam definisi ini terdapat kalimat yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu ta'zir merupakan ajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had. Dengan demikian, ta'zir tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud. Akan tetapi, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat mungkin hukumannya adalah hukuman mati.
- Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkâm Al-Sultâniyyah.
Ta'zir adalah mengajarkan (kepada pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hukum hudud. Hukum ini berbeda-beda status hukumnya, tergantung pada keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir sama dengan hukum hudud dari satu sisi, yaitu mengajarkan (untuk menciptakan) kesejahteraan dan melaksanakan ancaman yang berbeda-beda jenisnya sesuai dengan dosa (yang dilakukan). Pengertian ta'zir yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dikutip oleh Abu Ya'la.
- Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam Jarîmah Al-Risywah fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah.
Ta'zir merupakan sanksi hukum yang wajib ditegakkan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan dosa yang tidak ada sanksi dan

penebusannya. Hal mendasar yang ditegaskan dalam definisi ini adalah bahwa ta'zir bukanlah sanksi yang termasuk jenis sanksi hudud dan penebusan, karena ta'zir merupakan kebijakan penguasa setempat.

- Abdul Aziz Amir dalam *Al-Ta'zîr fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*.
Ta'zir merupakan sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumnya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan dosa yang tidak termasuk dalam sanksi had dan kafarat. Ta'zir sama dengan hudud dari segi fungsinya, yaitu sebagai ajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman. Pengertian ini memiliki kemiripan dengan pengertian ta'zir menurut Al-Mawardi. Dilihat dari tahun wafatnya penulis, sangat mungkin Abdul Aziz Amir mengutip pendapat Al-Mawardi.
- Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyrî' Al-Jinâ'î Al-Islâmî Muqâranan bi Al-Qânûn Al-Wad'î*.
Ta'zir merupakan ajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang dijatuhkan atas terjadinya suatu tindak pidana tertentu yang tidak ditentukan hukumannya secara khusus dalam syariat.
- Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisân Al-'Arab*.
Ta'zir merupakan hukuman yang tidak termasuk had, ia berfungsi untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan dan mencegahnya agar tidak melakukan dosa. Kata al-ta'zir pada dasarnya berarti ajaran. Oleh karena itu, hukuman yang tidak termasuk had ini disebut ta'zir, karena ia berfungsi sebagai ajaran. Makna lain dari kata al-ta'zir adalah mencegah dan menghalangi. Oleh karena itu, bagi seseorang yang telah engkau tolong, berarti engkau telah mencegah musuh-musuhnya dan mencegah siapa saja yang akan menyakitinya. Dari sini, ajaran yang tidak termasuk dalam ranah had disebut ta'zir.

b) Tujuan dan Syarat Sanksi Ta'zir

Berikut adalah tujuan dari diberlakukannya sanksi ta'zir, yaitu:

- Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
- Kuratif (islâh). Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syariat Islam tidak menentukan hukuman yang berbeda-beda untuk setiap tindak pidana ta'zir, melainkan hanya menyebutkan serangkaian hukuman, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang tepat. Dengan demikian, sanksi ta'zir tidak memiliki batasan tertentu. Ta'zir berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Syaratnya, mereka berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun

perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kejahatan atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak benar - baik dengan tindakan, ucapan, maupun isyarat - perlu diberi sanksi ta'zir agar mereka tidak mengulangi perbuatannya..

c) Ruang Lingkup Ta'zir

- Jarimah hudud atau qishash-diyat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi ta'zir, seperti:
 - Orangtua yang mencuri harta anaknya.
 - Orangtua yang membunuh anaknya.
- Kejahatan hudud atau qishash-diyat yang tidak memenuhi syarat akan dikenakan sanksi ta'zir. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan perzinaan.
- Kejahatan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis, tetapi sanksinya tidak ditetapkan. Misalnya, penghinaan, tidak menjalankan amanat, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
- Kejahatan yang ditetapkan oleh ulil amri untuk kemaslahatan masyarakat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, perdagangan manusia, dan pencucian uang.

Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- Kejahatan ta'zir yang menyinggung hak-hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, mencuri tanpa hak, mencium wanita yang bukan istrinya, menimbun kebutuhan pokok, dan penyelundupan.
- Kejahatan ta'zir yang menyinggung hak-hak individu, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan masyarakat. Misalnya, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.

d) Macam-macam Sanksi Ta'zir

- Sanksi Ta'zir yang Berkaitan dengan Badan

- Hukuman Mati

Mazhab Hanafi memperbolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Misalnya, pencurian berulang-ulang dan penghinaan terhadap Nabi beberapa kali dilakukan oleh orang-orang kafir dhimmi yang baru saja masuk Islam.

- Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup ampuh untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana ta'zir. Hukuman dalam tindak pidana hudud ini memiliki jumlah yang jelas bagi pelaku tindak pidana zina ghairu muhsan dan qadzif. Akan tetapi, dalam tindak pidana ta'zir, hakim

diberi kewenangan untuk menentukan jumlah hukuman cambuk yang disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat terjadinya tindak pidana.

- Sanksi Ta'zir yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang
 - Hukuman Penjara
Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu, yang keduanya berarti al-man'u yang berarti mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, al-habsu adalah menahan seseorang dari melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Inilah yang dimaksud dengan al-habsu pada masa Nabi dan Abu Bakar. Namun, setelah wilayah Islam meluas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah seharga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.
 - Hukuman Pengasingan
Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman ini juga diterapkan sebagai hukuman ta'zir. Di antara jarimah ta'zir yang dijatuhi hukuman pengasingan adalah orang-orang yang perilakunya mukhannats (waria) yang telah dilakukan oleh Rasulullah dengan cara mengasingkan mereka ke luar Madinah. Begitu pula dengan tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, karena konon katanya ia memiliki paras yang sangat tampan dan menarik, padahal sebenarnya ia tidak mengamalkan jarimah. Selain itu, Umar juga menjatuhkan hukuman pengasingan dan cambuk kepada Mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel Baitul Mal..
- Hukuman Ta'zir yang Berkaitan dengan Harta
 - Menghancurkannya (Al-Itlâf)
Pemusnahan barang sebagai hukuman ta'zir berlaku bagi barang yang mengandung kemungkaran. Contoh:
 - Pemusnahan patung milik umat Islam.
 - Pemusnahan alat musik atau permainan yang mengandung kemungkaran.
 - Pemusnahan alat dan tempat minum khamr. Khalifah Umar pernah memutuskan untuk membakar tempat minuman keras milik Ruwaisiyid. Umar pun memanggilnya dengan sebutan Fuwaisiq, bukan Ruwaisiyid. Begitu pula Khalifah Ali pernah memutuskan untuk membakar kampung-kampung penjual khamr. Pendapat ini merupakan pendapat yang populer dalam madzhab Hanbali dan Maliki.

- Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang dicampur air untuk dijual, karena jika susu tersebut telah tercampur air, akan sulit diketahui kadarnya.

Pemusnahan barang-barang tersebut tidak selalu wajib dan dalam kondisi tertentu boleh ditiptkan atau disumbangkan untuk sedekah.

- Mengubahnya (Al-Ghayîr) Hukuman ta'zir berupa mengubah harta pelaku, termasuk mengubah patung yang disembah umat Islam dengan cara memenggal kepalanya sehingga menyerupai pohon atau vas bunga.
- Kepemilikan (Al-Tamlîk) Hukuman ta'zir berupa kepemilikan harta pelaku, termasuk Rasulullah menggandakan denda bagi orang yang mencuri buah selain hukuman cambuk. Begitu pula keputusan Khalifah Umar yang menggandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

B. Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di PAYO LEBAR KOTA JAMBI pada tanggal 25 Agustus 2024. Materi penyuluhan yang diangkat Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh warga PAYO LEBAR KOTA JAMBI.

SUSUNAN ACARA			
Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat			
No	Waktu	Acara	Keterangan
1.	10:00-10:30	Pembukaan:	Mc
		• Menyanyikan lagu Indonesia Raya	
		• Pembacaan Doa	
2.	10:30-12:00	Materi:	Pemateri
		• Pengantar Hukum	
		• Hukum di Indonesia	
		• Hukum Pidana Islam (Ta'zir)	
• Ice Breaking			
3.	12:00-12:30	Penutup	Mc

Gambar 1.1 Susunan Acara Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir)

Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, penulis mempersiapkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selama penyuluhan berlangsung, agar selama penyuluhan berlangsung acara berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah uraian kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan:

1. Kegiatan diawali dengan pembukaan, pada bagian pembukaan kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa agar acara berjalan dengan lancar.

2. Kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian materi penyuluhan. Materi yang disampaikan berupa:
3. Pengantar hukum yang menjelaskan secara garis besar apa itu hukum
4. Hukum di Indonesia menjelaskan bagaimana hukum diterapkan di Indonesia
5. Pentingnya memahami hukum menjelaskan betapa pentingnya pengetahuan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia.
6. Hukum Pidana Islam (Ta'zir) menjelaskan tentang apa itu hukum pidana Islam, apa itu hudud, dan apa saja bagian-bagian hudud, serta bagaimana kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
7. Mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan
8. Ice breaking sebelum acara ditutup

LEMBAR SOAL DAN JAWABAN

**Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan
Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang kamu ketahui tentang hukum?	
2.	Bagaimana pendapat anda tentang hukum yang ada di Indonesia?	
3.	Seberapa jauh pemahaman anda kamu tentang hukum?	
4.	Seberapa penting pemahaman hukum bagi masyarakat?	
5.	Apa yang kamu ketahui tentang hukum pidana islam?	
6	Apa yang kamu ketahui tentang ta'zir?	

Gambar 1.2 Lembar Soal Penyuluhan Hukum

Dari hasil yang diperoleh masyarakat PAYO LEBAR KOTA JAMBI sangat terbantu dengan diadakannya acara penyuluhan hukum ini, sehingga masyarakat lebih paham hukum dan lebih terbuka terhadap informasi hukum di Indonesia. Masyarakat lebih sadar tentang betapa pentingnya hukum dan patuh terhadap hukum.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan utamanya. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan yang tegas bagi setiap warga negaranya. Setiap aspek kehidupan diatur sedetail mungkin dalam undang-undang.

Hukum pidana merupakan keseluruhan pengaturan mengenai perbuatan apa saja yang dilarang dan diharamkan, serta hukuman apa yang akan diterima apabila melanggarnya.

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'zir. Syariat merupakan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana apabila dilarang oleh syariat.

Masyarakat PAYO LEBAR KOTA JAMBI sangat terbantu dengan diadakannya acara penyuluhan hukum ini, sehingga masyarakat menjadi lebih memahami hukum dan lebih terbuka terhadap informasi hukum di Indonesia. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya hukum dan menaati hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mawardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm 1.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, “Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, Cetakan Pertama, Jakarta: Pohon Cahaya, 2017.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha: Jakarta.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477.
- Heri Gunawan. (2021). Edukasi dan produktivitas masyarakat di masa pandemi (Amar Ali Aulia (ed.)). LP2M UIN SGD.
- Hidayat, M. R., Sopacua, M. G., Hasibuan, A. K. H., Bogenda, C., Tihahelu, J. A. S., Simbolon, N. Y., Irwanto, Surya, A., Saragih, G. M., Usman, R., Purwoto, A., Masruha. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Widina Bhakti Persada: Bandung.
- Irfan, N., Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Penerbit Amzah: Jakarta
- Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55.
- Johnson, B & Christensen, L. 2012. Educational Research. Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. London: SAGE Publications, Inc.
- Marsinah, R. (2014). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 86–96.
- Musjtari, D. N. (2019). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Dusun Jetis, Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 151– 160.
- Pradoto, W. S., Jumiati, A., Risnandhi, D., & Prasetyo, Y. A. (2020). Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1–6.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.